

KERAJAAN LOLODA: DINAMIKA EKONOMI, POLITIK, DAN MILITER DI MALUKU UTARA MASA KEKUASAAN KOLONIAL BELANDA (1817—1942)

Abd. Rahman¹, Rusli M. Said²

^{1,2} Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

Email: randy5eman@ymail.com¹, ruslisaid039@gmail.com²

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan menjelaskan eksistensi kehadiran Kerajaan Loloda dalam dinamika ekonomi, politik, dan militer yang terjadi di Maluku Utara sampai pada runtuhnya kekuasaan Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia pada 1942. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Sejarah, dengan tahapan: 1) penelusuran dan pengumpulan sumber-sumber sejarah dari kepustakaan, kearsipan, lapangan, dan dokumentasi (heuristik); 2) analisis dan sintesis (kritik, verifikasi, dan validasi data); 3) interpretasi hasil analisis dan sintesis data; dan 4) penulisan sejarah (historiografi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat kerjasama diplomatik antara Ternate dan Pemerintah Kolonial Belanda sejak tahun 1817 melalui kontrak-kontrak politik dengan alasan kerja sama dan persahabatan yang saling menguntungkan, justru menyebabkan seluruh kekuatan ekonomi, politik, dan militer Loloda mulai diperlemah dan diambil alih oleh Ternate untuk kepentingan Belanda. Meskipun Loloda berada dalam bayang-bayang kekuatan Ternate dan Belanda, namun kerajaan itu masih dapat menjalankan fungsi-fungsi ekonomi, politik, dan militernya selama dalam periode 1817-1942, meskipun berada di bawah kekuasaan Ternate atas persetujuan Belanda.

Kata Kunci: *Loloda, Ekonomi, Politik, Militer, Kolonialisme-Belanda*

ABSTRACT. This study aims to explain the existence of the presence of the Loloda Kingdom in the economic, political, and military dynamics that occurred in North Maluku until the collapse of the power of the Dutch Colonial Government in Indonesia in 1942. This study uses historical research methods, with the following stages: 1) tracing and collecting sources historical sources from literature, archives, field, and documentation (heuristics); 2) analysis and synthesis (criticism, verification, and validation of data); 3) interpretation of the results of analysis and data synthesis; and 4) writing history (historiography). The results showed that the cooperation between Ternate and the Dutch colonial government since 1817 through political contracts on the grounds of mutually beneficial cooperation and friendship, actually caused all of Loloda's economic, political and military power to be weakened and taken over by Ternate to Dutch interests. Although Loloda was in the shadow of the power of Ternate and the Netherlands, the kingdom was still able to carry out its economic, political and military functions during the period 1817-1942, even though it was under the control of Ternate with the consent of the Dutch.

Keywords: *Loloda, Economic, Politics, Military, Dutch-Collonial*

PENDAHULUAN

Kerajaan Loloda terbentuk pada awal abad ke-13 dan berpusat di Teluk Loloda, di Pesisir Pantai Barat Laut Kepulauan Halmahera. Loloda bertetangga dengan Kerajaan Jailolo yang berpusat di pesisir pantai barat daya kepulauan itu juga. Sementara itu, kerajaan Bacan menempati pulau Bacan yang sejak abad ke-16 berpindah dari pulau Makian ke Kasiruta

dan selanjutnya ke Labuha di Pulau Bacan. Di antara keempat kerajaan tersebut, dari sisi tingkatan kekuatan ekonomi, politik, dan militernya dapat diurutkan sebagai berikut: Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Sementara itu, Loloda, rupanya masih berada dalam keaburan sejarah. Penelitian mengenai Loloda dalam konteks posisi ekonomi, politik, dan militer penting dilakukan karena Loloda adalah salah satu

aset sejarah Propinsi Maluku Utara dan aset Sejarah Nasional Indonesia yang belum diketahui oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Dalam kaitannya dengan tema dan topik penelitian, dalam hal ini dapat disampaikan bahwa penelitian tentang Loloda dalam aspek ekonomi, politik, dan militer, adalah bagian dari upaya menjelaskan bahwa meskipun Loloda terpinggirkan dalam sejarah, namun sesungguhnya kerajaan tersebut masih ada dalam Sejarah Maluku Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memilih tempat yang berfokus di Loloda Halmahera Utara dan Barat, baik di daratan maupun di kepulauan, terutama di Kecamatan Loloda (Loloda Selatan Daratan dan Kepulauan) di Soasio, Halmahera Barat. Jangka waktu penelitian berlangsung dari bulan Maret 2021 sampai dengan November 2021. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sejarah. Dengan tahapan sebagai berikut: *pertama*, heuristik, yakni menelusuri, mencari, dan mengumpulkan data, baik secara primer maupun sekunder, lisan maupun tulisan, cetak maupun elektronik. Pencarian data tersebut dilakukan di perpustakaan, kearsipan, lapangan, dan kegiatan-kegiatan riset visual dokumenter di dalam maupun di luar ruangan. *Kedua*, kritik (verifikasi dan validasi) data yang telah dikumpulkan dari berbagai tempat. Semua sumber yang ditemukan dikumpulkan dan diklasifikasi menurut jumlah, jenis, dan temanya (ekonomi, politik, dan militer). Selanjutnya dilakukan validasi dan verifikasi sumber baik secara internal (jenis, bentuk, dan isi data) maupun eksternal. *Ketiga*, interpretasi (membangun pemahaman)

sumber yang telah diverifikasi dan divalidasi, dengan menarik uraian-uraian deskriptif-analitis atas semua fakta dan peristiwa yang ditemukan dari dalam sumber; dan *Keempat*, Historiografi, yakni penulisan sejarah berdasarkan sumber-sumber relevan dengan peristiwa yang akan dikisahkan berdasarkan tahapan dan proses analisis dan sintesis serta intepretasi yang seobjektif mungkin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Loloda di Kawasan Laut dan Kepulauan Maluku.

Kerajaan Loloda terletak di Pantai Barat Laut Halmahera, sebuah ‘negeri teluk’, karena kondisi alamnya menunjukkan demikian. Pusat pemerintahan Kerajaan ini berada di sebuah teluk pada sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Loloda bahagian selatan (de Clercq, 1890a & de Clercq, 1890b in Taylor & Richards, 1999; van Baarda, 1904; Campen, 1888; Baretta, 1917; Andaya, 1993a & Andaya, 2015b; & Widjojo, 2007a: xxxiv). Ibu kota Loloda, berada di pinggir sungai Soasio di antara Kampung Bakung dan Laba Besar, yang aliran sungainya bermuara ke Laut Maluku melalui Teluk Loloda (van Fraassen, 1978: 115; van Fraassen, in Masinambow, [ed.], 1980b: 115-116).

Dalam konteks kesatuan wilayah pemerintahan tradisional di Maluku, nama Loloda menjadi: *Moloku Loloda, Jiko Mabirahi, Toma Ngara Mabeno* (Maluku Loloda, negeri teluk yang indah, dan penguasa pintu gerbang Maluku di ujung utara [de Clercq, 1890a & de Clercq, 1890b in Taylor & Richards, 1999: 177 & 214]). Keterangan tersebut dilengkapi

dengan sebuah sumber berbahasa Perancis (1712) yang mengatakan bahwa Loloda adalah sebuah kerajaan tersendiri (*Le Royaume de Loloda* atau *Loloda Regnum*, atau Kerajaan Loloda) di Pantai Barat Laut Halmahera yang didirikan dengan bantuan orang-orang Alifuru, sebuah komunitas suku bangsa asli yang bermukim di wilayah kerajaan tersebut.

Dari Inggris ke Belanda: Loloda dalam Peralihan Kuasa Kolonial

Berdasarkan Konvensi London 13 Agustus 1814, yang turut ditandatangani Belanda dan Inggris maka pada 19 Agustus 1816, Pemerintah Kolonial Belanda, kembali dikukuhkan di Batavia sebagai penguasa atas seluruh Maluku, namun masih dalam situasi pemerintahan peralihan (*interregnum*). Penyerahan kekuasaan atas Maluku dari Inggris ke Belanda baru terjadi pada 1817. Peristiwa Perlawanan Nuku adalah sebuah revolusi untuk melepaskan dan memulihkan Maluku dari cengkraman berbagai bangsa Eropa (Andaya, 1993a & Andaya, 2015b: 332—343). Kembalinya kekuasaan Pemerintahan Kolonial Belanda pasca Pemerintahan Inggris atas Maluku adalah didasarkan pada perjanjian antara Belanda dan Inggris lewat penandatanganan Konvensi London, 13 Agustus 1814.

Pengambilalihan kekuasaan pemerintahan atas seluruh wilayah Maluku tersebut, juga ditetapkan secara konstitusional di Belanda melalui dewan negara (*landraad*) kerajaan itu. Dalam Pasal 39 Konstitusi (*Grondwet*) Kerajaan Belanda tahun 1814 dituliskan bahwa, “kekuasaan pemerintahan tertinggi dapat diselenggarakan di wilayah dunia yang lain tanpa kecuali” (*de Vorst heeft bij*

uitsluiting het opperbestuur over in andere wereldheden). Pasal 39 Konstitusi (*Grondwet*) Kerajaan Belanda tahun 1814 diselaraskan dengan Konvensi London, 13 Agustus 1814 sebagai landasan pengambilalihan kekuasaan yang ditandatangani oleh Kerajaan Belanda dan Inggris. Konstitusi tersebut menyatakan bahwa wilayah-wilayah koloni yang diduduki Pemerintah Kolonial Belanda (*De Kolonien en Bezittingen van de Staat*) yang terdapat di Asia dikembalikan kepada Belanda.

Guna mendukung pelaksanaan Pasal 39 Konstitusi 1814 Kerajaan Belanda tersebut, Pemerintah Kerajaan Belanda mengeluarkan Keputusan Kerajaan (*Koninklijke Besluit*) tertanggal 22 September 1814 untuk membentuk suatu Komisi Umum (*Commissie Generaal*) yang terdiri dari tiga orang. Ketiga orang tersebut bertugas atas nama Raja Belanda untuk mengambil alih negeri-negeri (tanah-tanah dan daerah-daerah) jajahan Belanda di Asia dari tangan Inggris. Pada masa itu oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, Loloda dimasukkan ke dalam wilayah Keresidenan Ternate dan daerah-daerah bawahannya (*de Residentie van Ternate en Onderhorigheden*) dan sementara itu, Ternate mengklaim Loloda sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya dan sekaligus sebagai kerajaan vasal (bawahan).

Peran Ekonomi Loloda dan Tekanan Kolonial Berbasis Kontrak

Kerajaan Loloda di dalam ketiga Kontrak Ternate—Belanda (1817, 1822, dan 1824), berposisi sebagai sumber pendapatan dari sektor pajak dan tenaga kerja bagi Ternate dan Belanda. Seluruh

wilayah Loloda di Halmahera Utara, termasuk di wilayah-wilayah pesisirnya, kaya akan sumber daya alam, termasuk rempah cengkih dan pala.

Pentingnya Loloda bagi Ternate, ialah bahwa Ternate secara geografis hanyalah sebuah pulau kecil yang tidak memiliki cukup sumber daya baik alam maupun manusia untuk menjamin kekuatan ekonomi, politik, dan militernya. Oleh karena itu, Loloda selalu menjadi bahan pertimbangan Ternate untuk membantunya memenuhi kebutuhannya sendiri dan pemerintah kolonial. Ternate tidak akan berdiri sebagai sebuah kekuatan ekonomi, politik, dan militer tanpa menguasai Loloda (*VOC in Collectie Nationaal Archief*, 1990: 5, 280 & 406). Raja dan Kerajaan Loloda telah terlibat dalam tiga kontrak politik antara Kesultanan Ternate di satu pihak dan Pemerintah Kolonial Belanda di lain pihak selama tujuh tahun pertama kembalinya Belanda berkuasa di Maluku Utara.

Peran Politik Loloda dan Tekanan Kolonial Berbasis Kontrak

Sejak penandatanganan Kontrak Tahun 1817, selain pengekanan dalam bidang ekonomi dan perdagangan, Pemerintah Kolonial Belanda juga melakukan pengekanan dalam aspek diplomasi sebagai bagian dari sistem politik luar negeri kerajaan-kerajaan lokal di Maluku Utara. Pengekanan itu adalah bahwa Kesultanan Ternate dan Kerajaan Loloda tidak diperbolehkan berhubungan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya selain Belanda. Apabila Kesultanan Ternate dan Kerajaan Loloda kedatangan bangsa-bangsa Eropa (kulit putih) selain Belanda, maka kedua kerajaan tersebut

harus segera melaporkannya kepada pihak pemerintah kolonial. Orang-orang Kesultanan Ternate dan Kerajaan Loloda dilarang untuk melakukan surat-menyurat dan berkomunikasi serta berinteraksi baik lisan maupun tulisan, bahkan menjalin pertemanan dan persahabatan dengan bangsa-bangsa kulit putih lainnya selain Belanda. Kedua kerajaan itu juga dilarang membuat kontrak dan perjanjian-perjanjian politik dengan bangsa kulit putih lainnya. Isi pasal-pasal Kontrak 1817 sangat merugikan Ternate dan Loloda dari sisi diplomatik dan hubungan kerja sama internasional dengan negara dan bangsa-bangsa kulit putih dan berwarna lainnya di dunia (PNRI, Koleksi Arsip Manuskrip Ternate, (*Tractaat van Vriendschap en Alliantie Vernieuwe en Gesloten*) Kontrak 16 September 1817: 1—25). Bangsa-bangsa asing yang dimaksud di atas sesungguhnya tidak hanya Eropa selain Belanda tetapi termasuk pula Arab, Cina, Jepang, dan sebagainya yang dikhawatirkan berbahaya bagi Pemerintah Kolonial Belanda di Maluku.

Peran Militer Loloda dan Berbagai Ancaman di Kawasan Laut dan Kepulauan Maluku

Untuk menjaga stabilitas keamanan seluruh wilayah Keresidenan Ternate dan daerah-daerah bawahannya, maka Pemerintah Kolonial Belanda selalu melakukan pengerahan pasukan-pasukan pribumi yang diambil dari penduduk Halmahera khususnya di bahagian utara dan barat, termasuk dari Loloda. Hal itu dilakukan Belanda sejak kembali mengambil alih kekuasaan atas Maluku dari Inggris pada 1817. Fenomena itu menunjukkan bahwa Pemerintah Kolonial

Belanda tidak hanya membutuhkan kekuatan ekonomi dan politik, tetapi juga membutuhkan kekuatan militer yang cukup besar untuk mengamankan seluruh wilayah kekuasaannya di Maluku. Untuk memperoleh kekuatan militer yang besar, Pemerintah Kolonial Belanda melalui Sultan Ternate, Tidore, Bacan, dan Loloda, pasukan-pasukan tempur dengan jumlah dan kualitas memadai yang diharapkan Belanda dapat tercapai. Beberapa peristiwa yang membutuhkan pengerahan kekuatan militer dari kalangan penduduk pribumi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Pertama, permintaan bantuan Pemerintah Kolonial Belanda kepada Ternate dan Tidore berupa pasukan dan *juanga* (kapal perang) untuk mengatasi gerakan pemberontakan Kapitan Pattimura (1783—1817) yang bergolak sejak tanggal 17 Mei 1817. Sultan Muhammad Ali (1807—1822) dari Ternate mengirim 20 *juanga* dengan 1500 pasukan Alifuru, demikian pula halnya Sultan Tidore, Muhammad Tahir (1810—1821). Pada Oktober 1817, pasukan gabungan Belanda, Ternate, dan Tidore berhasil memadamkan gerakan perlawanan Pattimura (de Clercq, 1890a: 173 & de Clercq, in Taylor & Richards, 1999, hlm. 123). *Kedua*, pada 1819, Belanda mengirim ekspedisi besar ke kepulauan Raja Ampat (Papua) dengan bantuan pasukan Ternate dan Tidore. Tujuan ekspedisi itu adalah mengejar Sultan Jailolo III, Hajuddin, yang dilaporkan berada di sekitar kepulauan itu. Hajuddin mengangkat dirinya sendiri dengan dukungan para pengikutnya sebagai Sultan Jailolo III menggantikan Muhammad Asgar (Sultan Jailolo II) yang diasingkan Belanda ke Jepara (Leirissa, 1996b: 143—157). *Ketiga*, pada 1826,

untuk mengatasi kemungkinan lepasnya Tobungku dari Ternate, sebuah armada *juanga* yang memuat ribuan tentara di bawah pimpinan Kapitan Laut Kaicil Abumaha, dikirim ke Tobungku. Dengan bantuan Belanda, armada tersebut berhasil meredam pemberontakan Tobungku (de Clercq, 1890a: 174 & de Clercq, 1890b in Taylor & Richards: 126). *Keempat*, untuk meredam perlawanan Pangeran Diponegoro (1825—1830) di Jawa Tengah (Yogyakarta) yang membuat Belanda kewalahan, Pemerintah Kolonial Belanda meminta bantuan pasukan kepada Kesultanan Ternate dan Tidore. Pada 21 Mei 1825, dikirim bantuan pasukan Alifuru dari Ternate sejumlah 562 orang tantara. Tidore juga mengirim pasukannya yang terdiri dari 290 orang tantara ke Semarang dengan kapal *de Hoop*. Dalam peristiwa Perang Jawa tersebut, Sultan Ternate mengirim *Sadaha* Loloda ke Jawa atas dasar persetujuan Pemerintah Keresidenan Ternate untuk menjadi salah seorang pemimpin pasukan (de Klerck, 1894: 821).

Pemberontakan Kapita Sikuru dari Laba dan Degradasi Kekuasaan Kerajaan Loloda

Semakin intensif dan kuatnya pelaksanaan berbagai kebijakan penataan wilayah pemerintahan atas Maluku Utara oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang tidak memihak kepada rakyat dan penguasa pribumi bahkan semakin menekan, meresahkan, dan merugikan, pada akhirnya memicu munculnya perlawanan Kapita Sikuru (van der Crab, 1878: 410-411 & 449) dari Kampung Laba di Loloda. Faktore-faktor terjadinya Pemberontakan Kapita Sikuru sebagai

pemicu utama degradasi kekuasaan pada Kerajaan Loloda dapat diuraikan di bawah ini sebagai berikut.

a. Pemungutan Pajak (*Belasting*).

Sebelum awal abad ke-20, ketika Pemerintahan Kolonial Belanda belum mengambil alih urusan pemungutan dan pengelolaan pajak pribumi di Maluku Utara, pelaksanaan pemungutan pajak dipegang sendiri oleh Sultan-Sultan Maluku dan para pejabat lokal yang diberi tugas untuk itu. Kegiatan itu terutama nampak sekali di Ternate, Tidore, dan Bacan serta Loloda dan distrik-distrik lainnya di Halmahera Utara. Otoritas dan dominasi Kesultanan Ternate dan para bangsawannya begitu besar terhadap Halmahera bagian utara dan barat dalam hal pemungutan pajak dan upeti dalam bentuk *ngase* (hasil penanaman tanaman ([*in natura*])). Loloda baik di Halmahera bagian utara maupun yang di sebelah baratnya menjadi sumber kekuatan ekonomi Kesultanan Ternate yang menguntungkan kesultanan itu. Penguasa dan penduduk pribumi Loloda di Halmahera Utara pada awalnya tidak berkeberatan dengan otoritas kesultanan Ternate itu bahkan menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa sejak periode VOC berkuasa hingga akhir abad ke-19. Mereka tidak bisa membendung hegemoni Kesultanan Ternate yang didukung kekuatan politik dan militer pemerintah kolonial atas wilayah mereka. Meskipun demikian, Raja Loloda tetap selalu berusaha mempertahankan entitas politik dan kedaulatannya sendiri di hadapan kedua kekuatan itu (ANRI. *MvO*,

K.H.F. van Roos [1903-1909], 1910: 8). Otoritas raja dan para sultan beserta para pembantunya untuk memungut pajak baik pajak kerja maupun pendapatan di wilayah-wilayah kekuasaannya sendiri lama-kelamaan menimbulkan kecemasan bagi Pemerintah Kolonial Belanda. Pihak keresidenan Ternate merasa berada dalam ancaman kerugian besar jika dominasi dan otoritas pemungutan pajak tidak segera diambil alih dari para penguasa pribumi dan diubah sistemnya. Atas dasar pertimbangan yang mendalam, Pemerintah Kolonial Belanda mengubah sistem pemungutan pajak untuk seluruh penduduk Keresidenan Ternate dari bentuk pajak hasil penanaman (*in natura*) atau pajak hasil bumi (*ngase*) ke bentuk pajak uang tunai (monetisasi).

b. Pengerahan Tenaga Kerja (*Rodi*).

Berdasarkan Pasal 57 *Regeringsreglement* (RR) tahun 1815 yang mulai berlaku efektif pada 1868, maka pada 22 Oktober 1894 Pemerintah Kolonial Belanda bersama Sultan Ternate ke-26, Muhammad Ajanhar (1879-1896) dan Sultan Tidore, Ahmad Qawiyuddin (1867) menandatangani Perjanjian *Hereendiensten* (suatu sistem kerja rodi untuk kepentingan umum yang dibebankan kepada penduduk pribumi) dan *Gemeentediensten* (program kerja rodi di daerah-daerah yang berada langsung di bawah pemerintahan Gubernur [Stibbe & Stroomberg, *ENI*. 1935e: 6 & 147]). Perjanjian itu berlaku secara efektif pada 24 Maret 1896. Mengingat

perjanjian ketenagakerjaan tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah kolonial, maka pada tanggal 28 Juni 1909, perjanjian *hereendiensten* dan *gemeentediensten* itu diperbaharui dan ditandatangani oleh Sultan Ternate ke-37, Muhammad Usman (1896—1929) dengan Pemerintah Kolonial Belanda melalui Residen Ternate ke-28, K.H.F. van Roos (1903—1909). Perjanjian itu dibuat untuk menegaskan kembali sistem kerja rodi yang lama pada 22 Oktober 1894 sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 57 *Regeringsreglement* (RR) tahun 1815. Penundaan pemberlakuan itu disebabkan karena RR tersebut tidak efektif pelaksanaannya. Pengerahan tenaga kerja baik yang terikat maupun yang bebas, baik yang berdasarkan kontrak dengan upah maupun tenaga kerja bebas sukarela tanpa ikatan kontrak dan upah di seluruh wilayah Keresidenan Ternate, menimbulkan perdebatan. Tenaga kerja kontrak dengan upah yang ditentukan biasanya hanya ditujukan pada tenaga kerja impor dari luar Keresidenan Ternate. Sementara itu terdapat upaya pemerintah kolonial untuk menghapus pengerahan tenaga kerja impor tersebut karena pertimbangan penghematan anggaran. Pemerintah Kolonial Belanda selalu mencari jalan agar pelaksanaan pengerahan tenaga kerja penduduk pribumi melalui program *heerendiensten* dan *gemeentediensten* bersifat suka rela tanpa upah dan tanpa jaminan meskipun dengan ikatan kontrak kerja. Pemerintah kolonial berusaha

menghilangkan jaminan kesehatan, transportasi, makanan, dan tempat tinggal yang layak bagi para pekerja pribumi. Pengerahan tenaga kerja bebas dan suka rela dari kalangan penduduk pribumi diharapkan oleh Belanda dapat berjalan lancar untuk berbagai pekerjaan. Rencana penghapusan pengiriman tenaga kerja upahan misalnya dari Banda dan Timor berikut segala peralatannya untuk diganti dengan sistem kerja suka rela yang murah tanpa upah, ditolak oleh raja Loloda (Alfares Banggai [1895—1906]), Sultan Ternate (Muhammad Haji Usman [1902—1914]), Tidore (Ahmad Qawiyuddin [1867]), dan Bacan (Patra Muhammad Usman Syah [1900—1935]). Pada 9 Februari 1909, di Loloda terjadi peristiwa perlawanan Kapita Sikuru dari Soa (kampung) Laba. Jika dilihat dalam skala koordinasinya nampak terlihat bahwa aksi perlawanan itu nampak sangat terencana. Dalam pandangan Residen Ternate, K.H.F. van Roos, gerakan perlawanan rakyat Loloda hanya dianggap sebagai kerusuhan dan huru-hara biasa. Namun, ternyata Residen Ternate tidak cukup hanya mengirim pasukan satu pleton tentara bersenjata lengkap yang terdiri dari 30 orang personil ke Loloda pada 14 Februari 1909, di bawah komando Letnan Maihuizen. Rupanya residen tersebut masih meminta bantuan satu armada kapal yang terdiri dari delapan buah kapal pengangkut pasukan dari Manokwari, Papua, lewat Ambon. Armada tersebut diberangkatkan ke Loloda untuk

meredam perlawanan Kapita Sikuru dan para pengikutnya.

- c. **Aktivitas Zending.** Pada 1865 setahun sebelum berakhirnya Pemerintahan Gubernur Kepulauan Maluku, di Maluku Utara mulai berlangsung aktivitas Kristenisasi digerakkan oleh perkumpulan misionaris Protestan bernama *Utrechtsche Zending Vereniging* (UZV) yang didirikan di Utrecht, Belanda. Perkumpulan itu mulai masuk ke Maluku Utara pada masa pemerintahan P. van der Crab (1863-1867) sebagai Residen Ternate yang meminta UZV beroperasi di Halmahera. Tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut adalah melakukan gerakan Kristenisasi di Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, dan Papua. Permintaan itu dikabulkan Pimpinan UZV di Belanda, dan pada 14 April 1866, rombongan Pendeta UZV pertama tiba di Galela. Rombongan ini terdiri dari dua pendeta, masing-masing Van Dijken dan H.H. Bode, kemudian disusul pendeta ketiga, Klaessen. Pada tahun berikutnya, tiba pula pendeta keempat, Been (Baretta, 1917: 62 & Amal, 2007a: 290). Keberhasilan van Baarda membaptis orang-orang Dorume, membuat sebagian orang yang berada di kampung lain yakni Asmiro, Salangade (Tobo-Tobo), dan Jikolamo merasa tertarik menganut agama Kristen Protestan. Selain itu, rasa takut kepada Raja Loloda, Alfarus Banggai (1895—1906) dan para bawahannya juga menjadi alasan mereka untuk tidak kembali ke kampung asalnya (*Het Penningsken: Hulpvereniging*

der Utrechtsche Zendingvereniging, 1899-1900: 1—4; *NRC*, 04-06-1914: 5; *NAC-AH*, 14-06-1914: 6; & Metz, 1910: 42—53; Baretta, 1917: 60-67). Raja Loloda dan penduduknya yang Muslim menganggap bahwa aktivitas Kristenisasi yang digerakkan oleh para misionaris UZV, telah mengancam kekuasaan Raja Loloda di seluruh Pantai Barat dan semenanjung utara Halmahera (*Nieuwe Rotterdamse Courant*, 71^{ste}. No. 153, Donderdag, 4 Juni 1914: 5 & *Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad*, Donderdag, 14 Juni 1914:6).

Integrasi Loloda dalam Kekuasaan Ternate dan Runtuhnya Kuasa Kolonial Belanda. Akhir Perlawanan Kapita Sikuru dan Dampaknya.

Penduduk Loloda khususnya orang-orang Alifuru yang ikut terlibat dalam peristiwa perlawanan Kapita Sikuru dikejar dan ditangkap oleh patroli-patroli Belanda. Setelah ditangkap mereka diberi hukuman setimpal yakni dari hukuman kerja paksa hingga penjara dan tembak mati. Hukuman kerja paksa meliputi pekerjaan membangun jalan dan jembatan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Orang Loloda mengabadikan peristiwa perlawanan rakyat Loloda di bawah pimpinan Kapita Sikuru tersebut dalam sebuah syair lokal berjudul “Kolano Madodaga” atau “akhir sang raja” (Hasan, 2001: Mansyur, 2007a: Mansur. 2013b) yang berbunyi sebagai berikut:

*Kapal dai Lalaweri, Sordano
Walanda Na Kapal; Isa yo parang
Laba; ma sarsan o uci; ma komdan
o ginado; Hongi ma kapita nage;
ma kapita, Kapita Sikuru;*

masongo-songo Bagina; Madiki-diki Kayoa; Mamegi una Tasa; Suba Jou Kolano Malamo-lamo; Au le". (Tampaknya Kapal sedang berlayar; Kapalnya Tentara Belanda; Mari kita berperang bersama orang Laba; Ketika prajurit (sersan) pun turun; Komandannya pun bertanya; siapa panglima hong (armada perang); Dan kami pun menjawab, kapitanya, Kapita Sikuru; Bagina sebagai rekannya; Kayoa sebagai pesuruhnya (otaknya); Dan Tasa sebagai penunjuk jalan; Sembah kepada Tuan Raja yang Mulia; Bunuh").

Kutipan di atas menunjukkan bahwa peristiwa perlawanan rakyat Loloda di bawah kepemimpinan Kapita Sikuru bersama para pengikutnya menggunakan cara gerilya dengan menjadikan laut sebagai media perlawanan terhadap pasukan-pasukan Pemerintah Kolonial Belanda. Peristiwa pertempuran tersebut berdampak besar bagi kelangsungan entitas politik dan kedaulatan Loloda di dunia Maluku yang semakin memperkuat kekuasaan Ternate dengan dukungan otoritas politik dan militer Pemerintah Kolonial Belanda. Jika merujuk pada berita koran Amsterdam Baru dan Majalah Perdagangan Umum Belanda yang terbit pada Sabtu, 13 Maret 1909 (*Kolonial Verslag*, 1909: 77) sesungguhnya termasuk ke dalam kategori *onlusten* atau *ongeregeldheden* (kerusuhan [*Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad* (NAC-AH), Maandag, 19 December 1910:9-12; *Het Nieuws van den Dag, voor Nederlandsch-Indie*, 1909, No. 37, Woensdag, 15 Februari:1-3]), sebagaimana kutipan di bawah ini:

Ternate. Aan de "Deli Cour". Werd uit Buitenzorg het volgende gemeld: De Resident van Ternate seinde 14 Febr., dat de aanvoerders van onlusten te Loloda gevangen genomen zijn, waarbij Arruser, de broeder van den Radja van Loloda zich bevindt en de Radja zelf met twee rijks-grooten, die weten van den moord op de ontslagen Labareezen. Er waren 3 dooden en 8 gewonden. De schuldige kampongs worden gestraft met weg-arbeid (Ternate. Kepada "pengadilan di Deli", berikut ini dilaporkan dari Buitenzorg (Bogor), sebagai berikut: Residen Ternate mengumumkan bahwa pada tanggal 14 Februari biang keladi kerusuhan di Loloda telah ditangkap, di mana, Raja Loloda dengan dua saudaranya yang juga adalah para pembesar kerajaan Loloda dituduh telah mengetahui terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang Laba yang menewaskan tiga orang dan delapan lainnya terluka. Orang-orang yang terbukti bersalah dalam peristiwa itu dihukum dengan cara kerja paksa membangun jalan dan jembatan desa.

Setahun setelah peristiwa perlawanan itu ditemukan pula sebuah koran baru yang terbit pada 1910 (*Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad* [NAC-AH], Maandag, 19 December 1910: 9) yang memberitakan sebagai berikut:

"Reeds het vorig jaar hebben lieden van deze voort nabij Loloda aan de Noordkust ongeregheden verwekt, waarbij de bestuurs-assistent Rooij en twee oppassers werdeu vermoord"

(Pada tahun yang lalu di pesisir pantai utara Loloda, telah terjadi sebuah kerusuhan besar yang menewaskan seorang asisten-administrasi Rooij, dan dua orang opsir polisi pengawalnya juga tewas terbunuh

Kutipan koran di atas menunjukkan bahwa: *pertama*, kategori perlawanan yang terjadi di Loloda sebagai peristiwa *Ongeregeldheden* (kerusuhan) dan yang *kedua*, informasi mengenai nama pejabat pemerintah Belanda yang tewas dalam peristiwa perlawanan itu yaitu seorang *Asisten Bestuur* (Asisten Pemerintahan), sebuah jabatan setingkat wakil kepala *Onderafdeeling*, bernama van Rooij (*Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad [NAC-AH]*, Maandag, 19 December 1910: 9). Raja dan bangsawan Loloda yang oleh Belanda terlibat dalam kerusuhan itu adalah Syamsuddin Syah (*kolano*), Arafane (*Kapita Lao*), Sikuru (*Kapita*), Kayoa (kaicil=pangeran), Tasha (penunjuk jalan), dan Bagina (pengawal). Istilah lain yang bersifat umum namun sepanjang sumber yang tersedia seperti koran terkait perlawanan Kapita Sikuru adalah *verzet* (*Het Nieuws van den Dag, voor Nederlandsch-Indie [HND-NI]*, Maandag, 15 Februari 1909: 1) suatu kata dalam bahasa Belanda, yang jika diindonesiakan berarti ‘resistensi’ (melawan dan bertahan) yang dalam bahasa Inggris berarti ‘resistance’ (perlawanan/penentangan).

Loloda: Akhir Sebuah Kerajaan di Maluku Utara. Dampak politik yang sangat penting dalam sejarah Loloda pasca perlawanan Kapita Sikuru dari kampung Laba dan pemecatan Kolano Loloda terakhir, Syamsuddin Syah (1906-1909),

adalah dibubarkannya Loloda sebagai Kerajaan Maluku secara *de facto* namun secara *de jure* baru terjadi secara total pada 1915, bertepatan dengan meninggalnya Raja Loloda terakhir tersebut dalam pengasingannya di Ternate. Kolano tersebut meninggal di Ternate pada 1915 setelah sebelumnya dibuang ke Jawa. Status raja (*kolano*) diubah oleh Belanda menjadi hanya sebagai seorang *Sangaji* (kepala distrik) yang pada masa itu masih setingkat bupati (kepala daerah kabupaten), namun sejak pasca kemerdekaan hingga pada sekitar tahun 1960-an diturunkan satu tingkat lebih rendah di bawa kabupaten yakni kecamatan, yang berarti bahwa jabatan *Sangaji* hanya setingkat camat (kepala kecamatan) sebagaimana yang terlihat pada hari ini di Loloda. Dari tahun 1909 hingga 1915, di Loloda terjadi kekosongan kekuasaan. Istana Loloda sebagai simbol kekuasaan Kerajaan Loloda telah hancur sejak 1909. Enam tahun kemudian yakni pada 1915, bertepatan dengan tahun meninggalnya Kolano Syamsuddin Syah, Loloda benar-benar telah berakhir sebagai salah satu Kerajaan Maluku. Seiring dengan pengambilalihan kedaulatan dan hak berkuasa Sultan Ternate, Tidore, dan Bacan dari tahta kerajaannya masing-masing.

Runtuhnya Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda 1942 dan Kehadiran Jepang.

Pada tahun 1942, Jepang masuk ke wilayah Maluku Utara, dan berhasil menaklukkan Belanda yang menandai fase awal berakhirnya kekuasaan Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di wilayah ini. Setelah itu, pada tanggal 6 April 1942,

seluruh kekuasaan Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda resmi diambil alih oleh bala tentara pendudukan Jepang. Dengan demikian, maka Maluku Utara resmi jatuh di bawah kekuasaan Jepang. Pada awal tahun 1943, Jepang mulai membangun basis-basis militernya di sejumlah kawasan di Maluku Utara. Kesatuan tentara-tentara pendudukan Jepang mulai membangun pangkalan-pangkalan militernya di sejumlah tempat di Halmahera dan Morotai. Untuk membangun fasilitas-fasilitas militernya, Bala Tentara Pendudukan Jepang mengerahkan rakyat secara paksa tanpa upah dan makanan yang cukup. Misalnya dalam pembangunan dua lapangan landasan pacu pesawat terbang (bandar udara) militer di Galela. Selain mengerahkan tenaga rakyat, Jepang juga mendatangkan tenaga kerja paksa dari Loloda di Halmahera dan Morotai. Pekerjaan membangun bandar udara militer itu baru berakhir setelah pasukan-pasukan sekutu (Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Australia) berhasil menduduki Pulau Morotai sambil melakukan pemboman tanpa henti terhadap basis-basis pertahanan militer Jepang di wilayah Halmahera Utara dan Tengah. Peristiwa ini mulai berlangsung pada tanggal 15 September 1944, ketika tentara-tentara Sekutu, dari kesatuan *South West Pacific Command* yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur, dari Amerika Serikat, yang mana ia berhasil melakukan pendaratan di Morotai (Amal & Djafaar. 2003: 296-297).

Sebelum melakukan serangkaian aksi pemboman atas basis-basis pertahanan militer Jepang, Sekutu meminta kepada rakyat di daratan dan kepulauan Halmahera agar segera menyingkit ke

tempat-tempat yang akan terkena sasaran pemboman, untuk menyelamatkan diri masing-masing. Rakyat Loloda, terutama yang masih berada di wilayah bagian selatan agar segera mengevakuasi diri ke Pulau Kahatola (sebuah pulau yang berada di sekitar perairan Teluk Loloda), dan di sana mereka mendapatkan perlindungan dari Sekutu. Menurut informasi dari salah seorang keturunan bangsawan Loloda yakni Haji Abdul Malik, bahwa Setelah rakyat Loloda dievakuasi ke Pulau Kahatola, ayahnya, Haji Djami bin Syamsuddin yang ketika itu menjabat sebagai *gemeente* Loloda Selatan, di bawah oleh tentara Sekutu ke Morotai dengan menggunakan sebuah *speedboat*. Setibanya di Morotai ia kemudian diberi sepucuk senjata api oleh Sekutu sebagai upaya berjaga-jaga dalam menghadapi ancaman serangan tentara-tentara Jepang (Mansur, 2007a: 69).

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan pembahasan Hasil Penelitian tentang: Dinamika Ekonomi, Politik, dan Militer Kerajaan Loloda di Maluku Utara (1817 – 1942) di atas, yaitu bahwa meskipun berada dalam hegemoni kekuasaan Kesultanan Ternate dan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sejak ditandatanganinya tiga kontrak pertama (kontrak 1817, 1822, dan 1824) antara Kesultanan Ternate dan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, namun Loloda tetap dapat melaksanakan peran-peran ekonomi, politik, dan militernya baik untuk kepentingan internal kerajaannya maupun untuk kepentingan Kesultanan Ternate dan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Peran ekonomi Loloda, mencakup sumbangannya dalam bidang:

produksi hasil-hasil bumi; peran politiknya, mencakup kesediaannya menandatangani kontrak-kontrak politik yang disepakati Kesultanan Ternate dan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, sejak kembalinya Belanda menguasai Maluku Utara (1817-1942). Loloda, selama dalam periode itu meskipun oleh Ternate diklaim sebagai kerajaan vazal, namun kerajaan tersebut tidak selalu bersedia mengikuti apa saja yang diperintahkan Ternate, apalagi yang berhubungan dengan pemenuhan kepentingan ekonomi, politik, dan militer Belanda. Hal itu terbukti dengan pecahnya pemberontakan rakyat Loloda yang disebut atau Perang Laba pada 1906-1909, pimpinan Kapita Sikuru, yang berpuncak pada 14 Februari 1909. Pemberontakan tersebut berakibat ditutupnya secara resmi Kerajaan Loloda pada 1915 dengan dimasukkan ke dalam kekuasaan Kesultanan Ternate oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, hingga runtuhnya pemerintahan kolonial tersebut pada 1942.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal M. Adnan. 2010. *Kepulauan Rempah-Rempah: Maluku Utara Perjalanan Sejarah 1250-1950*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). Makassar: Pusat Kajian Agama dan Masyarakat (PUKAT)-Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Andaya, Leonard Y. 2015. *Dunia Maluku: Indonesia Timur pada Zaman Modern Awal*. Yogyakarta: Ombak.
- ANRI. 1971. Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah Arsip Nasional Republik Indonesia, No. 4: *Laporan Politik Tahun 1837 (Staatkundig van Nederlandsch Indie, 1837)*. Jakarta: ANRI.
- , Koleksi Arsip Ternate, Positive Film/MF/2E/Reel 27/MvO (*Memorie van Overgave*), K.H.F. van Roos, 1910.
- Baarda, M.J. van. 1908-1909. *Nog Iets Aangaande. Heer Pokken" op Halmahera. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie*. Volume 67, Issue 1, pages 58 –72.
- B.P., Paulus. 1979. *Garis Besar Hukum Tata Negara Hindia Belanda*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Baretta, J.M. 1917. *Halmahera en Morotai Werk Naar de Memorie van Den Kapitein van Den Generalen Staf*. Batavia: Javasche Boekhandel & Drukkerij.
- Bleeker, P., Schlegel en G.F. Westerman. (1865). *Nederlandsch Tijdschrift voor De Dierkunde, Uitgegeven door het Koninklijk Zoologisch Genootschap, Natura Artis Magistra*, te Amsterdam, Onder Redactie van, Tweede Jaargang, Koninklijke Bibliotheek te 's Hage, Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1865.
- Crab, P. Van der. 1862a. *De Moluksche Eilanden: Reis van Z.E den Gouverneur-Generaal Charles Ferdinand Pehud door den Molukschen Archipel*. Batavia: Lange en Co.
- , 1878b. *Geschiedenis van Ternate, in Ternataanschen en Maleischen Text, Beschreven door de Ternataan Naidah, met Vertaling en Aantekeningen door P.A. van der Crab*, BKI. Vol. 26. No. 2.
- Dictionaire Geographique Universel, Cotenant une description exactee des etats, Royaumes, Villes, Forteresses, Montagnes, Caps, Isles, Presqu'iles, Lacs, Mers,*

- Golfes, Detroits, & c. De l'Univers, L tout tire' du Dictionaire Geographique.* Autrecht, Chez Guillaume van de Water, MDCCXII (1712). Avec Privilege de Nosseigneurs less Etats de Hollande & de Westsrise.
- De Clercq, F.S.A. 1890a. *De Bijdragen tot de Kennis der Residentie Ternate.* Leiden: Brill.
- (1890b). *Ternate The Residency and Its Sultanate (Bijdragen tot de kennis der Residentie Ternate)*, Translated from the Dutch by Paul Michael Taylor and Marie N. Richards. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Libraries Digital Edition, 1999.
- Fraassen, Ch. F. Van. 1978. "Types of Socio-Political Structure in North-Halmaheran History". *Majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia*. Jilid II No. 2 hal. 115.
- Hasan, Abdul Hamid. (2001). *Aroma Sejarah dan Budaya Ternate.* Jakarta: Antara Pustaka Utama.
- Het Penningsken: Hulpvereeniging der Utrechtsche Zendingvereeniging, 1899-1900: 1—4.*
- Het Nieuws van den Dag, voor Nederlandsch-Indie (HND-NI), 1909, No. 37, Woensdag, 15 Februari:1-3].*
- Iskandar, Mohammad. 2007. *Aksi Kolektif Petani Ciomas Tahun 1886: Dampak Politis bagi Pemerintahan Hindia Belanda.* Depok: Disertasi pada Program Studi Ilmu Sejarah-Program Pascasarjana-Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya-Universitas Indonesia.
- Jacobs, Hubert Th.Th. M. 1971. *A Treatise on The Moluccas (c.1544): Probably Preliminary Version of Antonio Galvao's Lost: Historia Das Moluccas*, Edited, Annotated, and Translated in to English from The Portuguese Manuscript in The Archivo General de Indies, Seville. Rome, Italy: Jesuit Historical Institute via dei Penitenzieri 20 00193, St. Louis University, St Louis, Mo. 63103, USA.
- Jacobs, Hubert Th.Th. M. (ed. & ann.). 1984. *Monumenta Historica Societatis Iesu*, Published by de Jasuit Fathers, Volume 126. Monumenta Missiounum Societatis Iesu Volume
- Kartodirdjo. Sartono. (1978a). *Protest Movement in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Century.* Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Lapian, Adrian B. 2011. *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX.* Depok: Komunitas Bambu-Freedom Institute (Center for Democracy, Nationalism, and Market Economy Studies.
- Leirissa. R.Z. 1996. *Halmahera Timur dan Raja Jailolo: Pergolakan Sekitar Laut Seram Awal Abad Ke-19.* Jakarta: Balai Pustaka.
- Mansur, Mustafa. 2013. *Transformasi Politik di Loloda Maluku Utara (1808-1945).* Bandung: PPS-UNPAD (Tesis).
- Masinambow, E.K.M. 1976. *Konvergensi Etnolinguistis di Halmahera Tengah: Sebuah Analisa Pendahuluan.* Depok: Program Doktor Ilmu Susatra-Program Pascasarjana-Fakultas Sastra-Universitas Indonesia (Disertasi).
- M. Moeliono, Anton, dkk. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KABBI) Pusat Bahasa*, Edisi Keempat. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional-PT Gramedia.
- Moertono, Soemarsaid. 2017. *Negara dan kekuasaan di Jawa.* Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

- Magany. 1984. *Bahtera Injil Halmahera*. Tobelo: Gereja Injil Maschi Halmahera (GMIH).
- Masinambow, E.K.M. (ed.). (1980a). *Halmahera dan Raja Ampat Konsep dan Strategi Penelitian*. Jakarta: Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional (Leknas-LIPI).
- , 2001b. "Bahasa Ternate dalam Konteks Bahasa-Bahasa Austronesia dan Non Austronesia" dalam Yusuf Abdulrahman, *et al.*, *Ternate Bandar Jalur Sutera*. Ternate: Lintas.
- Moedjanto, G. 2003. *Dari Pembentukan Pax Neerlandica sampai Negara kesatuan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad* (NAC-AH), Maandag, 19 December 1910:9-12;
- Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad* (NAC-AH), 14-06-1914: 6.
- Nieuwe Rotterdamsche Courant* (NRC), 71^{ste}. No. 153, Donderdag, 4 Juni 1914: 5.
- Nieuwe Rotterdamsche Courant* (NRC), 04-06-1914: 5.
- Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad* (NAC-AH), Donderdaag, 14 Juni 1914:6.
- Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad* [NAC-AH], Maandag, 19 December 1910: 9.
- Stibbe, D.G. en Stroomberg. 1935. *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*. Tweede Druk, Zesde Deel, 'sGravenhage, Martinus Nijhoff, 1932.